

## **Karet Alam Sebagai Basis Pembangunan Pedesaan dan Peningkatan Tarap Hidup Masyarakat yang Berkelanjutan**

**Rijal Ramdani, Eko Priyo Purnomo, Retno Dewi Pramudya Ahsani**

Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Ilmu Administrasi Negara, Universitas Tidar Magelang

*Email: rijalramdani@umy.ac.id; eko@umy.ac.id; pramodiaahsani@gmail.com*

### **Abstract**

*The research argues that natural rubber plantation can be prioritized as the basis of development process in Indonesian rural regions to extend the adaptive and sustainable development. This argument can become a point of view to criticize the paradigm of developmentalism merely focusing on the economic growth and industrialization. The research finding demonstrates that natural rubber plantation is an indigenous and cultural economic activity of Indonesian rural society and its identity. Even though, by four years, the price trend of the commodity has been impressively decreasing, it does not relate with the quality and prosperity of farmer's daily life and by the time, they can change their social structure by sending family's members to university. Moreover, the plantation has a sustainable characteristic as the commodity is adaptive with environmental biodiversity. For example, the canopy of its trees is widely greener, and the plantation can stabilize the soil and water volume of peatland. In regards of the institutionalism paradigm, as the highest population of poor families concentrated in the rural region, it also argues that the main duty of current Indonesia government is how to stabilize the rubber price in the national market and how to develop a sustainable institution of rubber farmers. Qualitative method was adopted in the research when the primary and secondary data are collected through observation, documentation, and in-depth interview. The research was conducted in Bengkalis regency, Riau Province, and Garut regency, West Java.*

### **Intisari**

Penelitian ini memiliki pandangan bahwa karet alam bisa dijadikan prioritas sebagai basis dalam melakukan pembangunan di pedesaan untuk mengembangkan pembangunan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan. Hal ini sebagai bentuk kritik terhadap paradigma developmentalisme yang menitikberatkan pada pertumbuhan ekonomi dan industrialisasi. Hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa karet alam merupakan aktivitas ekonomi yang telah menyatu menjadi identitas kebudayaan masyarakat di pedesaan Indonesia. Di tengah pelemahan harga, petani karet masih bisa hidup dengan tarap hidup memadai dan mampu merubah struktur keluarga dengan menyekolahkan anak-anaknya di perguruan tinggi. Di sisi lain tutupan karet alam sangat rindang dan di apabila ditanam di lahan gambut memiliki tingkat kebasahan yang tinggi. Dengan jumlah penduduk miskin tertinggi masih berada di pedesaan, berangkat dari pendekatan institusionalisme, maka tugas yang harus dilakukan pemerintah adalah bagaimana menstabilkan harga karet alam, membangun institusi petani yang berkelanjutan, dan mengintegrasikan perkebunan dengan peternakan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Data diperoleh dengan cara mengumpulkan data sekunder dan data primer melalui observasi lapangan, pendokumentasian, dan wawancara dengan petani karet alam di Bengkalis, Provinsi Riau dan Garut, Jawa Barat.

**Kata kunci:** *Institusionalisme; Karet Alam; Pembangunan Pedesaan Berkelanjutan*

### **Pendahuluan**

Penelitian ini memiliki pandangan bahwa karet alam merupakan produk perkebunan yang bisa menjadi basis dalam melakukan

pembangunan di pedesaan dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Ide ini sebagai bentuk kritik atas teori developmentalisme yang memandang bahwa negara maju adalah negara yang

mampu melakukan perubahan dari struktur masyarakat yang membasiskan perekonomian pada sektor agraris menjadi industri moderen. Pandangan ini tentunya kurang melihat aspek *ekternalitas negative* yang ditimbulkan terhadap lingkungan dan juga pembagian sumber daya alam yang tidak merata (Sachs, 2015). Sekalipun harga karet alam mengalami pelemahan sejak tahun 2013 (Anonim, 2017), akan tetapi dilihat dari sisi keberlanjutan, karet alam merupakan komoditas yang memiliki kontribusi signifikan terhadap perekonomian masyarakat di pedesaan. Di sisi lain karet alam pun ramah lingkungan karena sejalan dengan perlindungan keanekaragaman hayati yang ada di sekitarnya. Pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh pemerintah adalah bagaimana bisa menstabilkan harga dari tekanan faktor eksternal dan bagaimana bisa membangun institusi petani karet alam yang berkelanjutan.

Dalam paradigma *developmentalisme*, industrialisasi menjadi pilihan utama dalam pembangunan. Kebijakan-kebijakan Negara selalu diarahkan pada investasi di sektor industri yang berorientasi pada pasar dan pertumbuhan; *Gross Domestic/ National Product* (GDP/ GNP) (Solow, 1988). Sehingga pertumbuhan tersebut lebih banyak menguntungkan investor dan kelas menengah (Ul Haq, 2003). Dalam industri perkebunan kelapa sawit misalkan, sekalipun sawit memberikan sumbangsih yang tidak sedikit terhadap GNP dan ekspor Nasional, akan tetapi dampak lingkungan, dalam bentuk kebakaran hutan dan *deforestasi*, sungguh masif terjadi (Miettinen et al., 2012). Di sisi lain industri modern menjadikan kota sebagai sentra-sentra produksi. Padahal mayoritas penduduk miskin Indonesia berada di daerah pedesaan. Dalam industri textile dan

garmen misalkan, mengakibatkan terjadinya migrasi massif tenaga kerja – tenaga kerja muda desa ke wilayah-wilayah industri baru perkotaan (Purnomo, 2009).

Seharusnya yang dilakukan adalah mengembangkan pembangunan ekonomi di desa. Harus diakui bahwa dalam tujuh tahun terakhir (2010-2017), jumlah penduduk miskin desa dua kali lipat penduduk miskin kota di kisaran angka 18 – 20 juta. Oleh karenanya, pembangunan yang adaptif terhadap masyarakat agraris dengan kalateristik, kultur dan kemampuan masyarakat desa, harus selalu menjadi pilihan di daerah pedesaan sebagai turunan dari ide paradigma *developmentalisme* (Agrawal, 2001).

Dengan mengacu pada latar belakang di atas, pertanyaan utama di dalam paper ini adalah bagaimanakah prospek karet alam untuk bisa menjadi basis dalam pembangunan di pedesaan yang adaptif dan berkelanjutan? Di tengah tantangan paradigma *developmentalisme* yang selalu mengedepankan industrialisasi dan pertumbuhan ekonomi. Diskusi akan difokuskan pada beberapa tesis. *Pertama*; Negara maju tidaklah harus sebuah Negara yang membasiskan perekonomiannya pada sektor industri mesin dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memiliki kepedualian pada pemerataan sosial. *Kedua*; perkebunan karet alam bisa dijadikan sebagai basis dalam pembangunan yang adaptif untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di pedesaan. Dan *ketiga*, perkebunan karet alam memiliki sisi keberlanjutan sekalipun dihadapkan pada tantangan pelemahan harga secara makro. Pekerjaan rumah yang harus dilakukan pemerintah adalah menstabilkan harga dan membangun institusi petani yang berkelanjutan.

## Tinjauan Teoritis

### **Developmentalisme**

Developmentalisme lahir sebagai respon kaum intelektual atas Perang Dunia II yang telah menyebabkan munculnya negara-negara Dunia Ketiga (Mustofa, 2007). Developmentalisme sangat identik dengan industrialisasi karena memang terpengaruh oleh revolusi industri di eropa (Willis, 2011). Tujuan utama dari ide pembangunan developmentalisme adalah untuk menaikkan *income* masyarakat ke arah yang lebih sejahtera melalui pertumbuhan ekonomi (Kniivilä, 2007). Developmentalisme pun dibangun di atas landasan teori *kapitalisme* yang tidak bisa dilepaskan dari Adam Smith di dalam *Wealth of Nation* yang dilanjutkan oleh esai-esai Roy Harrod dan Evsey Domar (Solow, 1988). Kapitalisme memandang bahwa harus adanya pembatasan peran pemerintah seminimal mungkin dalam bekerjanya mekanisme pasar. *Kedua*, memenuhi kepentingan individu sama dengan memenuhi kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Dan *ketiga*, menitikberatkan kegiatan perekonomian pada sektor industri. Dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi, yang harus dilakukan adalah berproduksi. Hasil dari produksi diarahkan untuk dikonsumsi, maka konsumsi merupakan target dari produksi. Konsumsi hadir dengan adanya pasar, maka perluasan pasar menjadi kemestian untuk meningkatkan produksi menuju akumulasi kapital (Fakih, 2001). Puncak dari developmentalisme dijelaskan oleh W.W Rostow yang memiliki tiga asumsi dasar dalam bukunya *The Stages of Economic Growth: a Non-Communist Manifesto* (Rostow, 1990). *Pertama*, pembangunan adalah sebuah proses linier yang memerlukan perencanaan pertumbuhan matang dalam setiap segi pembangunannya, bukan proses gradual

yang *zig-zag* tanpa arah tertentu. *Kedua*, pembangunan juga berarti kemampuan ekonomi, maka untuk mencapai kemandirian ekonomi, sebuah negara harus melalui kelima tahapan pembangunan. *Ketiga*, jika dalam modernisasi, sebuah negara tidak mencapai tahapan-tahapan tersebut secara linier, maka pembangunan yang dilakukannya telah gagal. Kegagalan pembangunan adalah kegagalan melewati lima tahapan pembangunan tersebut (Rostow, 1990; Fakih, 2001).

Kelima tahapan pembangunan yang dimaksud oleh Rostow di atas adalah; masyarakat tradisional, kemudian berkembang menjadi masyarakat pra-kondisi tinggal landas, masuk menjadi masyarakat tinggal landas, kemudian masyarakat pematangan pertumbuhan, dan akhirnya masuk ke dalam fase masyarakat modern yang dicita-citakan sebagai masyarakat industri dan masa konsumsi tinggi (Rostow, 1990). Pembangunan diarahkan pada pertumbuhan ekonomi yang diukur melalui pendapat per kapita penduduk. Pendapatan per kapita adalah pendapatan rata-rata sebuah Negara dalam rentang waktu tertentu. Angka pendapatan per kapita diperoleh dengan cara membagi Pendapatan Nasional Bruto (PNB) sebuah Negara dalam tahun tertentu dengan jumlah penduduk di tahun yang sama (Willis, 2011). PNB sendiri atau yang didalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *Gross National Product* (GNP) oleh Sadono Sukirno diartikan sebagai nilai barang dan jasa yang dihitung dalam pendapatan nasional hanyalah barang dan jasa yang diproduksi oleh faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh masyarakat dari Negara yang pendapatannya nasionalnya dihitung (Sukirno, 2006).

### **Institusionalisme**

Akan tetapi banyak kritik yang dilontarkan terhadap ide developmentalisme. Misalkan Kuznets yang mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang selalu digadang-gadang paradigma developmentalisme menciptakan kesenjangan. Kuznets mengukurnya dengan Rasio Gini (Kuznets, 1955). Selain itu muncul juga kritik dari Mahbu Ul Haq yang mengatakan bahwa pembangunan bukan hanya memfokuskan pada pertumbuhan, akan tetapi yang jauh lebih penting adalah pemerataan (Ul Haq, 2003). Tidak kalah pentingnya adalah, masyarakat bukanlah objek yang bisa direkayasa untuk digerakan tetapi masyarakat adalah aktor utama. Hal ini merupakan pandangan dari institusionalisme yang melihat bahwa yang menjadi sentral dari perubahan sebagai peletak dasar dan pelakunya adalah masyarakat yang bersangkutan itu sendiri, *people center development* (Sen, 2000). Masyarakat harus memiliki kebebasan untuk menentukan nasibnya sendiri dan terlibat dalam proses pembangunan (Sen, 2000).

Di dalam institusionalisme, institusi dimaknai sebagai *the patten of relationship*, atau tindakan berpola dalam interaksi yang terus berulang. Selain itu institusi tidak hanya dipahami sebagai organisasi formal, seperti struktur dan aturan organisasi, akan tetapi juga penting untuk dilihat adalah aturan main, nilai, adat dan kebiasaan dari masyarakat itu sendiri (Quinn et al., 2007). Ostrom mengatakan bahwa ketika institusi dipahami dengan benar dan mampu diadaptasikan dengan kebutuhan dan konteks yang ada, maka institusi tersebut akan berhasil di dalam mengelola sumber daya alam (Ostrom and Hess, 2000). Oleh karena itu, pembangunan yang efektif harus bergantung pada konteks dan budaya lokal (Agrawal, 2001). Pembangunan harus

mampu menyeimbangkan tiga aspek, yaitu pertumbuhan ekonomi, partisipasi dan keterlibatan masyarakat, dan juga proteksi terhadap lingkungan (Ramdani, 2017). Hal ini memiliki arti bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan sesuatu yang penting untuk meningkatkan *income* masyarakat, akan tetapi pembagian sumberdaya alam harus dilakukan secara merata, masyarakat dilibatkan di dalam pembangunan, dan alam ini terbatas, sehingga penggunaan dan pemanfaatannya harus dilakukan dengan sebijak mungkin secara berkelanjutan (Savić et al., 2016).

Dari asumsi-asumsi di atas dapat dilihat dimana perubahan menuju kondisi yang lebih baik di dalam suatu masyarakat adalah kensicayaan, akan tetapi tidak mesti dipaksakan seperti melalui rekayasa sosial di dalam paradigma developmentalisme. Pola perkembangan di dalam setiap masyarakat tentu akan mengalami perbedaan. Tidak mungkin sama satu dengan yang lainnya, tidak mungkin melakukan generalisasi. Seperti dalam pandangan developmentalisme yang memandang setiap masyarakat akan mengalami perkembangan yang sama, mengingat pola interaksi antar satu masyarakat dengan yang lainnya memiliki perbedaan (Agrawal, 2001).

Sehingga wajar bila terjadi kegagalan-kegagalan pembangunan di Negara-negara berkembang yang justru terjatuh pada jebakan hutang dan kemiskinan (Sachs, 2015). Karena masyarakat agraris sangat kental nilai-nilai kekeluargaan, dan masih percaya terhadap mitologi. Developmentalisme menghancurkannya dengan melakukan anjuran-anjuran industrialisasi, membawa kepada pola hidup individualisme, dan nilai-nilai rasionalitas yang tinggi. Justru menurut Institusionalisme yang harus dilakukan

dalam pembangunan adalah mengembangkan *local wisdom*, teknologi lokal, sesuai dengan kapasitas kemampuan dan sesuai dengan ekonomi produksi lokal. Maka dengan demikian pola berproduksi, nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat, berikut teknologi yang digunakan tetap akan terpelihara. Pola pembangunan masyarakat lokal jauh lebih kompromistis dengan alam dan sesuai dengan paradigma *sustainable development* karena tidak menjadikan alam sebagai objek yang bisa dihabisi. Berbeda dengan developmentalisme yang selama ini pola pembangunannya cenderung sangat tidak kompromi terhadap kelestarian alam, sehingga pembangunan yang berkelanjutan seperti apa yang dikumandangkan di era orde baru di Indonesia banyak menghasilkan kerusakan-kerusakan lingkungan (Ramdani, 2017).

Dengan melihat pandangan institusionalisme seperti di atas bukan berarti institusionalisme memandang modernitas, teknologi canggih yang dihasilkan oleh ilmu pengetahuan adalah buruk. Akan tetapi institusionalisme melihat, pada akhirnya masyarakat dengan sendirinya akan berkembang menuju masyarakat dalam kapasitas tertentu. Hanya tingkatan masyarakat seperti apa yang akan diraih tidak bisa dipaksakan dan direkayasa. Biarlah masyarakat berkembang sesuai dengan pola interaksi yang berkembang di dalam masyarakatnya sendiri. Tidak harus keberhasilan pembangunan ditetapkan sesuai dengan kriteria-kriteria yang dikembangkan oleh developmentalisme, karena sejahtera memiliki pemahaman dan pemaknaan yang beragam antar satu masyarakat dengan masyarakat lainnya (Susetiawan, 2009).

Maka dalam pandangan peneliti, pandangan institusionalisme yang membasiskan

produksi pada perkebunan karet alam sangatlah tepat untuk menjadi acuan dalam melakukan pembangunan pedesaan di Indonesia, dengan melihat pola dan perkembangan masyarakat yang masih berada dalam kultur agraris. Tentunya sebagai masyarakat desa tidak mungkin dipaksakan untuk mampu menggerakkan alat-alat produksi yang canggih, karena tingkat pendidikan yang relatif rendah. Oleh karenanya kebijakan yang harus ditempuh oleh Negara adalah pembangunan yang menjadikan pertanian sebagai fokus utama. Sekalipun sektor pertanian selalu mendapatkan kritik pedas, seperti yang dilakukan oleh M.L. Jhingan dengan mengatakan ciri Negara terbelakang salah satunya adalah apabila pendapatan masih didominasi oleh sektor pertanian dan pola pertaniannya tradisional (Jhingan, 1988). Akan tetapi hal tersebut tidak harus menjadi acuan, apabila kesejahteraan yang sejati dan keberlanjutan pembangunan tidak dirasakan oleh masyarakat.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan serangkaian metode yang digunakan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang berasal dari masalah-masalah sosial. Proses penelitian dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan sebagai *research question*, mengumpulkan data, menganalisis data secara induktif dari tema-tema khusus ke umum, kemudian menafsirkan data tersebut untuk membangun suatu abstraksi sebagai temuan teoritis (Creswell and Creswell, 2017). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan review terhadap

dokumen-dokumen data online, pemberitaan media masa, dan menelaah hasil riset terdahulu. Sementara data primer didapatkan dengan cara melakukan *interview*, *observasi* dan pendokumentasian (Creswell and Creswell, 2017) dengan petani karet alam baik di Jawa Barat maupun di Provinsi Riau.

Analisis data dilakukan melalui tahapan berikut ini; *Pertama* mengolah dan mempersiapkan data untuk dianalisis. *Kedua*, membaca keseluruhan data. *Ketiga*, menganalisis data lebih detail dengan mengklasifikasikan data-data yang ada. *Keempat*, mendeskripsikan data. *Kelima*, penyajian kembali hasil deskripsi supaya lebih mudah untuk dipahami. Dan *Keenam* adalah analisis data dengan melakukan interpretasi baik melalui pengajuan pertanyaan sebagai hasil dari refleksi maupun dengan melakukan pemetaan dengan menggunakan logika yang bersumber dari teori (Creswell and Creswell, 2017).

## Hasil Dan Pembahasan

### **Kebudayaan Lokal, Kualitas Hidup dan Keberlanjutan**

Di bagian ini, akan dilihat bagaimana secara kultural perkebunan karet alam tidak bisa dilepaskan dari identitas dalam sistem produksi masyarakat di pedesaan Indonesia yang mampu merubah struktur ekonomi keluarga mereka. Secara natural dan secara ekologis karet alam pun memiliki keberlanjutan dibandingkan dengan perkebunan yang lain.

Sebagai masyarakat agraris, perekonomian masyarakat Indonesia di pedesaan tidak bisa dilepaskan dari perkebunan karet alam. Karet alam tersebar hampir di seluruh wilayah Indonesia, sekalipun yang paling banyak terdapat di pulau Sumatera, seperti

Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Sumatera Barat, Bengkulu, dan daerah-daerah lainnya di pulau Sumatera. Di pulau ini, secara kultural, masyarakat desa memandang bahwa karet alam adalah sumber penghidupan bagi mereka yang sifatnya panjang. Begitupun di Kalimantan, di Palangkaraya, Banjar, Palangaraya, dan daerah-daerah lainnya merupakan daerah-daerah penghasil karet alam Nasional dan di daerah-daerah tersebut masyarakat tergantung perekonomiannya terhadap karet alam.

Dapat dikatakan bahwa karet alam adalah identitas kebudayaan. Di dalam tradisi masyarakat Melayu, mereka yang memiliki kebun karet alam identik dengan tarap hidup yang memadai. Tokoh-tokoh adat, pastilah memiliki perkebunan karet alam yang cukup luas. Di dalam istilah mereka, karet alam adalah komoditas turun temurun yang bisa diwariskan. Berbeda dengan dengan tanaman sawit yang jarak produksinya memiliki keterbatasan 15 – 20 tahun. Sementara karet alam, sekalipun idelanya memang dilakukan penanaman kembali, akan tetapi bagi masyarakat Melayu, karet alam adalah tanaman seumur hidup yang bahkan terkadang bisa diwariskan. Hal ini menunjukan bahwa komoditas karet alam adalah sektor perkebunan yang basis pembangunannya sesuai dengan kontek masyarakat lokal itu sendiri. Sebagaimana yang dikatakan oleh Agrawal bahwa setiap masyarakat memiliki konteknya masing-masing (Agrawal, 2001). Salah seorang petani karet alam di Kabupaten Bengkalis provinsi Riau menuturkan:

*Di sini orang nanam karet alam lah sejak lama turun temurun. Awak tak tanam, dapat dari orang tua. Entahlah itu semu sudah ada. Kata orang sini ni,*

*getah tuh tanaman seumur hidup.  
Sampai awak mati tak habis-habis<sup>1</sup>.*

Dilihat dari kualitas hidup masyarakat, karet alam pun mampu memberikan sumbangsih yang luar biasa terhadap perubahan struktur keluarga. Dalam suatu kesempatan, seorang Ibu rumah tangga, istri dari petani karet alam menuturkan:

*Awak sama bapaknya Edi, sekolahkan anak semua karena getah. Getah itu gampang nggak kaya Sawit peliharanya. Tak usah dipupuk-pupuk banyak. Anak Ibu semuanya sarjana. Semua itu karena deras getah lah sama bapak Edi<sup>2</sup>. Semua orang di sini dulu tanam getah. Banyak yang bisa sekolahkan anak dari getah ini.*

Dari sini nampak terlihat bahwa komoditas karet alam secara perlahan mampu merubah kualitas hidup suatu keluarga di pedesaan. Dimana satu keluarga yang tidak memiliki latar belakang pendidikan memadai mampu merubah tingkat pendidikan anaknya ke jenjang pendidikan yang lebih baik karena imbas dari aktivitas berkebun karet alam yang dilakukannya. Hal ini sejalan dengan idenya Amartya Sein dan Mahbub Ul Haq bahwa pembangunan ekonomi tidak semata-mata didasarkan pada pertumbuhan berbasis angka, akan tetapi bagaimana aktivitas pembangunan tersebut mampu berdampak secara langsung terhadap tingkat pendidikan masyarakat untuk menjadikan manusia sebagai mahluk yang memiliki kebebasan (Sen, 2000; Ul Haq, 2003). Sekalipun secara hitungan ekonomi, sumbangsih karet alam terhadap GDP tidak signifikan, mislkan, akan tetapi dampaknya secara langsung bisa dirasakan oleh petani itu sendiri. Dengan kemampuan yang

sederhana, tanpa menggunakan alat-alat produksi modern yang sulit dioperasikan oleh petani, melalui perkebunan karet alam yang dimilikinya, justru mereka bisa melakukan perubahan terhadap kehidupannya sendiri.

Hasil studi yang dilakukan oleh Miharja di kabupaten Kuantan Singingi, provinsi Riau menunjukkan bahwa sekalipun rata-rata pendapatan per bulannya tidak lah terlalu besar, akan tetapi mayoritas mengatakan bahwa mereka merasakan hidup cukup dengan penghasilan yang didapatkan mampu memenuhi kebutuhan sehari-harinya (Miharja, 2014). Bahkan mereka pun mayoritas mampu menyekolahkan anak dengan penghasilannya tersebut, mereka merasa bersyukur dengan apa yang didapatkan, dan hanya sedikit yang merasa kecewa (Miharja, 2014). Hal ini sejalan dengan ide institusionalisme, yang melihat apa yang diperoleh dari aktivitas ekonomi tidaklah harus maksimal, cukup untuk bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari, akan tetapi aktivitas ekonomi tersebut bisa berkelanjutan.

Studi lain menambahkan, keuntungan dari karet alam akan bertampah ketika petani mampu mengintegrasikan kebun karet alam mereka dengan peternakan kambing atau sapi (Zurriyati et al., 2004). Akan tetapi hal ini masih jarang dilakukan, padahal ketika diintegrasikan nilai tambahnya akan sangat besar, tidak hanya dari getah tetapi juga dari peternakan. Pengamatan langsung yang dilakukan oleh peneliti di kecamatan Cisompet, kabupaten Garut, Jawa Barat, masyarakat menanam rumput *kolonjono* untuk ternak sapi. Hasilnya, setiap tahun mereka bisa mendapatkan pendapatan yang

---

<sup>1</sup> Penutupan seorang petani karet alam yang mendapatkannya dari warisan orang tua di Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, July 2017.

<sup>2</sup> Penuturan dari salah seorang Ibu (Siak Kecil, Bengkalis) pemilik kebun karet alam yang berhasil menyekolahkan kelima anaknya sampai ke jenjang sarjana, Mei 2018.

jauh lebih besar dibandingkan dengan hasil dari getah itu sendiri. *Kolonjono* tumbuh berkembang pesat apabila ditanam di sela-sela pohon karet. Salah seorang warga menuturkan:

*Sok sanaos pangaos karet geutahna teu sakumaha pangaosna, nu langkung nguntungkeunmah melak kolonjono kanggo parab sapi. Ayeuna weh tina sapi, ngalintuhkeun, ngical sataun 3 oge tos kabagean bersih 12 juta mah. Mun teu melak kolonjono di kebon karet sesah. Sareng nya sae weh kolonjono dipelak dina karet mah.*

Artinya ‘Sekalipun harga getah tidak seberapa, yang lebih menguntungkan adalah menanam kolonjono untuk pakan sapi. Kalau berhasil menjual 3 ekor saja, dari hasil penggemukan, dalam 1 tahun, maka kami bisa mendapatkan penghasilan bersih 12 juta. Susah untuk menanam kolonjono apabila tidak di kebun karet. Kolonjono yang ditanam di kebun karet kualitasnya bagus’<sup>3</sup>.

Meilani (2017) menambahkan, paling tidak beberapa hal yang mempengaruhi tingkat kesejahteraan petani karet alam adalah luas lahan yang dimiliki oleh petani, modal untuk melakukan aktivitas pertanian, tenaga kerja yang bekerja di kebun, etos kerja yang dimiliki oleh petani itu sendiri, dan pengalaman di dalam memelihara dan mengelola kebun karet alam (Meilani, 2017). Sisi ekonomis lain yang bisa dihasilkan dari karet alam adalah hasil kayu. Kayu dari pohon karet alam yang sudah tidak produktif lagi bisa digunakan untuk bahan bangunan maupun digunakan untuk kayu bakar (Asmani, 2012). Pengamatan peneliti di kecataman Siak Kecil, kabupaten Bengkalis menunjukkan, masyarakat

mendapatkan keuntungan yang besar dari penjualan hasil kayu tersebut. Dimana hasil dari penjualannya bisa menjadi akumulasi keuntungan bagi masyarakat untuk membeli kebutuhan *sekunder* dan *tersier*.

Selain itu dilihat dari sisi keberlanjutan, karet alam merupakan komoditas yang ramah akan lingkungan. Dalam pengamatan yang dilakukan oleh penulis di kabupaten Bengkalis provinsi Riau, kebun karet alam memiliki tutupan yang sangat rindang, hal ini tentunya berbeda dengan perkebunan sawit, sekalipun keduanya sama-sama merupakan tanaman mono kultur. Tanaman karet alam yang ditanam di lahan gambut memiliki tingkat kebasahan yang tinggi. Di perkebunan-perkebunan karet alam kaya akan fauna terutama kera. Berbeda dengan di perkebunan sawit, kera-kera tersebut tidak banyak ditemukan. Masyarakat melayu menuturkan, sebelum adanya invasi perkebunan kelapa sawit besar-besaran, dimana masyarakat masih sangat banyak yang menanam karet alam, di wilayah-wilayah pesisir Timur Sumatera, tidak pernah terjadi kebakaran besar, karena pohon karet alam pada hakikatnya merupakan tanaman hutan. Berbeda dengan saat ini, setelah masuknya Hutan Tanaman Industri (HTI) dan masyarakat beralih ke sawit, sekalipun penghasilan dari kebun sawit jauh lebih besar dibandingkan dengan keuntungan dari getah karet alam, kebakaran lahan sering terjadi, cuaca semakin panas, dan lahan gambut mengering. Hal ini sebagaimana penuturan masyarakat:

*Dulu sebelum ada hati, tak adalah kebaran. Orang semua di sini tanam getah. Sekarang ada HTI dan orang tanam sawit, banyaklah tebakau. Getah*

---

<sup>3</sup> Penuturan pemilik kebun karet dan peternak sapi di Kp. Pintu desa Panyindangan, kecamatan Cisompet, kabupaten Garut, Jawa Barat, Januari 2018

*itu tak tebakau, aman lah dari dulu sejak zaman nenek moyang kami.*<sup>4</sup>

Studi yang dilakukan oleh Asmani menjelaskan bahwa karet alam merupakan tanaman yang bisa menyimpan cadangan karbon dengan baik (Asmani, 2012). Lahan gambut yang kering menghasilkan CO<sub>2</sub> yang cukup besar sampai 355 Mt y and 855 Mt y (Hooijer et al., 2010). Akan tetapi ketika lahan gambut kering tersebut ditanami oleh karet alam maka akan menghasilkan karbon yang cukup baik (Asmani, 2012). Besaran volume karbon yang ada di perkebunan karet alam secara ilmiah sudah bisa diperhitungkan (Asmani, 2012). Sehingga selain keuntungan dari getah dan ternak yang dikembangkan, masyarakat pun melalui kelompok yang ada bisa mengembangkannya untuk mendapatkan keuntungan dari menjual cadangan karbon yang dihasilkan oleh kebun karet alam. Kriteria ini tentunya memenuhi ide dari pembangun berkelanjutan (Sachs, 2015), dimana di satu sisi karet alam bisa memberikan sumbangsih ekonomi terhadap masyarakat dengan kepemilikan yang cukup merata dan di saat yang bersamaan mampu melestarikan keanekaragaman hayati dan menyimpan cadangan karbon dengan baik. Sehingga dari sisi keberlanjutan bisa diambil suatu simpulan bahwa karet alam di Indonesia telah diakui menjadi sumber keragaman hayati yang bermanfaat dalam pelestarian lingkungan, sumber penyerapan CO<sub>2</sub> dan penghasil O<sub>2</sub>, serta memberi fungsi *orologis* bagi wilayah di sekitarnya. Selain itu tanaman karet alam ke depan akan merupakan sumber kayu potensial yang dapat mensubstitusi kebutuhan kayu yang

selama ini mengandalkan hutan alam. Dengan demikian maka, pembangunan berkelanjutan yang berbasiskan pada asumsi bahwa pembangunan tidak boleh merusak ekosistem alam akan tetap terjaga. Kondisi hutan Indonesia yang terus mengalami kerusakan dan kerusakan tanah akibat pupuk pestisida yang sangat dianjurkan dalam revolusi hijau di masa orde baru akan bisa teratasi dengan perkebunan karet alam.

### **Tantangan Karet Alam dan Penguatan Institusi Petani**

Secara makro, karet alam memiliki tantangan berat yaitu pelemahan harga yang cukup drastis. Di tahun 2014 harga karet alam dunia di kisaran 2,5 USD per kilogram, di tahun 2015 menurun drastis dengan sedikit fluktuasi di angka 1,5 – 2,0 USD dan situasinya semakin buruk di 2016 jatuh pada nilai terendah di bawah 1,5 USD per kilogram (Investment, 2018). Keadaan tersebut bisa jauh lebih rendah harganya di petani. Di Garut, Jawa Barat misalkan, sebahagian petani tidak mengambil getah sama sekali, karena dalam perhitungan mereka biaya untuk mengambil getah jauh lebih tinggi dibandingkan dengan upah yang harus dibayar. Mengingat, di petani, harga karet hanya sebesar Rp. 600.000,00.

*Lamun disadap, sadinteun kedah mayar Rp.85.000,00 ka padameul, padahal nu didameul sadinteun kur ngeingkeun Rp. 30.000,00. Kumaha amang bade mayarna kalah rugi nombok.*

Artinya ‘Kalau dideras, saya harus bayar pegawai Rp. 85.000,00, padahal sehari dia hanya menghasilkan Rp. 30.000,00.

---

<sup>4</sup> Penuturan salah seorang petani karet alam, di kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis provinsi Riau, July 2017.

Gimana saya bisa bayar, nggak untung, malah harus nombok<sup>5</sup>.

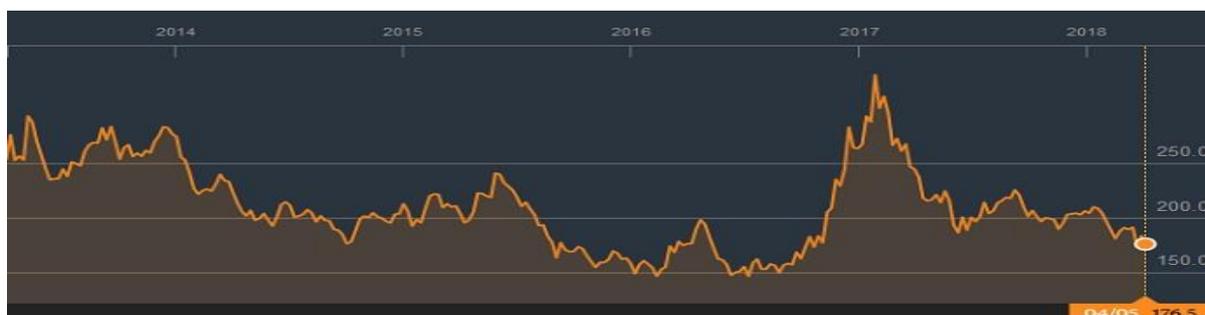
Penurunan harga karet alam tersebut tidak terlepas dari adanya pelemahan permintaan karena konsumen beralih ke karet sintesis yang harganya mengalami penurunan sebagai akibat dari penurunan harga minyak mentah sebagai bahan utama dari karet sintesis. Sehingga industri lebih banyak menggunakan karet sintesis (PPKIBP, 2015). Secara ekonomi hal tersebut merupakan sesuatu yang alamiah di saat permintaan rendah maka kecenderungan harga komoditas pun akan mengalami pelemahan. Selain itu faktor lainnya adalah akibat kemunculan negara-negara pengeskor karet baru, seperti Vietnam dan Pantai Gading yang mengakibatkan terambil alih-nya pasar karet alam Indonesia oleh kedua Negara tersebut (PPKIBP, 2015). Data menunjukkan bahwa nilai ekspor karet alam Indonesia berada di bawah nilai ekspor kedua negara tersebut (PPKIB, 2015).

Sedikit harapan kembali terjadi di tahun 2017, ketika harga karet alam mengalami kenaikan yang luar biasa hampir menembus angka 3,0 USD per kilogram. Angka tersebut merupakan angka dari target penyelamatan harga karet nasional oleh Pemerintah Indonesia. Kenaikan tersebut

tidak terlepas dari akibat bencana yang terjadi di selatan Thailand (Investment, 2018). Thailand merupakan produsen utama dari karet dunia. Disusul kemudian naiknya permintaan karet alam dari Negara yang sedang mengalami pertumbuhan ekonomi seperti Cina dan India. Ditambah dengan permintaan dari Negara-negara maju semisal Amerika Serikat, Jepang, Korea dan Nagara-negara Eropa. Tingginya permintaan dari Negara tersebut relatif tidak diikuti dengan pertumbuhan produksi dari negara-negara produsen karet alam di Negara lain (Parhusip, 2008).

Akan tetapi di tahun 2018 ini, harga karet alam kembali jatuh ke titik nadir di kisaran 1,5 USD per kilogram. Hal tersebut tidak terlepas dari keadaan ekonomi dunia saat ini. Sekalipun kecenderungan akan harga minyak dunia sebagai bahan dari karet sintesis mengalami kenaikan, dengan sedikit fluktuasi, perang dagang antara Amerika Serikat dengan Cina menyebabkan harga karet alam tetap tidak bergerak dari bawah (Nugroho, 2018). Tentu saja bisa dipahami, karena Cina dan Amerika merupakan target market dari produk karet alam Indonesia. Gambar flutuasi harga karet dalam Lima tahun terakhir bisa dilihat dalam Gambr. 1 berikut ini:

**Gambar. 1 Menggambarkan Penurunan dan Kenaikan Harga Karet Alam dalam Empat Tahun Terakhir dalam USD**



<sup>5</sup> Penuturan salah seorang pemilik kebun karet di Kp. Pintu Desa Panyindangan, Kecamatan

Cisompet, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Januari 2018

Sumber: Investment, 2018

Kondisi ini menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh pemerintah melalui kementerian pertanian dan kementerian perdagangan. Karena karet merupakan komoditas lapangan kerja bagi sekitar 1,4 juta kepala keluarga (KK) di seluruh pedesaan Indonesia dengan sumbangsih sekitar 85 persen dari total produksi karet alam di Indonesia (Hendaryati, 2017). Di masa lalu, peranan karet alam dan barang karet alam terhadap ekspor nasional tidak dapat dianggap kecil mengingat Indonesia merupakan produsen karet alam nomor dua terbesar di dunia dengan produksi sebesar 3,2 juta ton pada tahun 2014 setelah Thailand (4,7 jt ton) dan Indonesia memiliki luas lahan karet alam terbesar di dunia dengan luas lahan mencapai 3,4 juta hektar. Disusul kemudian oleh Malaysia (1,4 jt ton), Vietnam (1,04 jt ton), dan India (84 ton) (Parhusip, 2008).

Selain itu, karet alam 10 tahun silam memberikan kontribusi yang sangat berarti terhadap pendapat Negara melalui ekspor. Karet alam merupakan komoditi ekspor

yang mampu memberikan kontribusi terhadap perekonomian Indonesia. Dari data Departemen Pertanian dijelaskan sampai dengan tahun 1998 karet alam masih merupakan penghasil devisa terbesar dari subsektor perkebunan dengan nilai US\$ 1,1 miliar, sekalipun pada tahun 2003 turun menjadi nomor dua setelah kelapa sawit dengan nilai US\$ 1,4 miliar (nilai ekspor minyak sawit mencapai US\$ 2,4 miliar). Pada tahun 2005 pendapatan dari komoditas karet alam mencapai US\$ 2,6 miliar, atau sekitar 5% dari pendapatan devisa non-migas. Bahkan menurut Chairil Anwar pendapatan devisa dari komoditi ini pada semester pertama tahun 2006 mencapai US\$ 2.0 milyar, dan diperkirakan nilai ekspor karet alam pada akhir tahun 2006 akan mencapai US \$ 4,2 milyar (Anwar, 2006). Di samping itu, perusahaan besar yang bergerak di bidang karet alam juga memberikan sumbangan pendapatan kepada Negara dalam bentuk berbagai jenis pajak dan pungutan perusahaan.

**Tabel 1. Luas Tanaman Perkebunan Besar Menurut Jenis Tanaman (000 Ha)**

Tahun	Karet	Kelapa Sawit	Coklat	Teh	Kina
2006	513.2	3748.5	101.2	78.4	3.1
2007	514.0	4101.7	106.5	77.6	3.0
2008	515.8	4451.8	98.4	78.9	3.0
2009	482.7	4,888.0	95.3	66.9	3.0
2010	472.2	5,032.8	95.9	67.4	3.0

Badan Pusat Statistik (BPS) 2006-2010

Keadaan tersebut saat ini sudah berbalik, Sawit menjadi yang terdepan sebagai komoditas perkebunan yang paling banyak memberikan kontribusi terhadap GNP kita (Hamilton-Hart, 2015). Nasib karet alam tidak boleh seperti komoditas lainnya

seperti Cengkeh, Pala, Kopi, dan Coklat. Dimana komoditas-komoditas pertanian tersebut pernah unggul di masanya, akan tetapi karena tidak ada tata kelola yang memadai dari pemerintah dan kesalahan kebijakan yang terus diulang, akibatnya

komoditas itu tidak lagi menjadi komoditas unggulan. Tugas dari pemerintah melalui kementerian perdagangan yang utama adalah bagaimana menstabilkan harga karet alam dari tekanan faktor eksternal.

Peneliti melihat, sebetulnya kita masih memiliki harapan yang besar akan produksi karet alam untuk di masa yang akan datang. Di kita masih tersedia lahan tropis yang cukup besar yang sesuai untuk penanaman pohon karet alam. Produksi karet alam di Malaysia dan Thailand terus mengalami penurunan karena kebijakan pemerintahnya yang melakukan proteksi terhadap lahan (Wulandari, 2006). Daerah-daerah di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, dan Pulau Jawa masih banyak yang bisa dimanfaatkan untuk perluasan area perkebunan. begitupun dengan tenaga kerja, angka penduduk usia produktif dan angkatan kerja yang setiap tahun terus mengalami peningkatan dalam pandangan penulis bisa menjadi kekuatan dalam pengembangan perluasan pengembangan karet alam. Dengan demikian, sebagai negara produsen karet alam kedua terbesar di dunia pada saat ini, Indonesia berpotensi besar untuk menjadi produsen utama di masa yang akan mendatang.

Hanya yang menjadi pekerjaan rumahnya adalah bagaimana kita bisa menguatkan institusi petani karet di pedesaan tersebut. Tanpa institusi petani yang kuat, kita akan mengalami kesulitan di dalam membangun ekonomi karet. Dengan meminjam idenya Cortner (2014) ada beberapa tahapan yang bisa dilakukan untuk melakukan penguatan terhadap institusi petani karet alam tersebut. *Pertama*, petani karet alam harus memiliki dukungan kebijakan dari pemerintah baik di level pusat maupun daerah untuk menguatkan institusinya. Pemerintah secara proaktif mengeluarkan kebijakan untuk mendorong penguatan institusi petani. Di

sisi lain petani karet alam pun diberikan keleluasaan untuk terlibat dalam proses pengambilan kebijakan yang berhubungan dengan pengelolaan sumber daya alam, khususnya perkebunan karet. Idealnya kelompok petani karet alam memiliki perwakilan baik dengan menjadi anggota legislatif secara permanen maupun melalui perwakilan organisasi yang diberikan hak untuk terlibat dalam proses pengambilan kebijakan (Cortner, 2014).

*Kedua*, pemerintah berperan aktif dan turut serta di dalam melakukan penguatan kapasitas petani karet alam (Cortner, 2014). Hal itu bisa dilakukan melalui pendampingan teknis dan pemberian insentif. Insentif bisa berupa dana secara langsung, maupun dengan memberikan kebutuhan utama dari petani itu sendiri (Cortner, 2014). Dan yang tidak kalah pentingnya adalah pemerintah harus memberikan bantuan kepada petani karet alam berupa legalitas, baik dalam menjalankan aktivitas pertanian maupun terhadap organisasi petani itu sendiri (Cortner, 2014). Hal lain yang bisa dilakukan adalah dengan memberikan keleluasaan kepada *Non-Government Organizations (NGOs)* untuk melakukan pendampingan. *Study* yang dilakukan oleh Ramdani menunjukkan, salah satu faktor dari kuatnya institusi petani Hutan Kemasyarakatan (HKm) didorong oleh keterbukaan kebijakan yang membolehkan *NGOs* untuk secara masif melakukan pendampingan terhadap petani baik dalam melakukan teknis pertanian maupun pembentukan dan pengurusan legalitas organisasi (Ramdani, 2016).

*Ketiga*, kelompok petani karet alam harus memiliki jejaring dan kerja sama baik dengan pemerintah, kelompok petani lain, pihak perusahaan, *NGOs*, dan perguruan tinggi (Cortner, 2014). Kerja sama bisa

dilakukan secara formal maupun informal. Secara formal dilakukan dengan kesepakatan (*Agreement*), *memorandum of understanding* (MoU), maupun nota kesepakatan (Cortner, 2014). Sementara informal adalah hubungan-hubungan yang tidak mengikat akan tetapi memiliki keuntungan yang sangat besar (Cortner, 2014). Jejaring itulah yang disebut oleh Putnam sebagai modal sosial (Borg, Toikka, & Primmer, 2015) yang dimiliki oleh petani. Jejaring tersebut akan bisa didapatkan apabila petani memiliki sikap yang terbuka untuk melakukan komunikasi dan menerima pihak-pihak yang ingin bekerja sama (Ramdani, 2016). Apabila tertutup, maka akan sangat sulit untuk membangun jejaring dan mendapatkan pembelajaran dengan pihak lain.

*Keempat* adalah modal organisasi dan budaya petani (Cortner, 2014). Modal yang dimaksud adalah bagaimana petani karet alam bisa terhimpun di dalam organisasi yang memiliki modal dalam bentuk koperasi. Dengan terbentuknya koperasi maka setiap anggota memiliki kewajiban untuk menyimpan dan di saat yang bersamaan dibolehkan untuk meminjam. Sehingga organisasi petani melalui koperasi akan mampu memberikan modal bagi petani di dalam melakukan aktivitas pertanian itu sendiri. Di sisi lain, petani pun harus memiliki budaya untuk belajar ketika menghadapi perubahan (Cortner, 2014). Keberhasilan kelompok petani sangat ditentukan oleh sikap yang ingin selalu belajar terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di sekitarnya. Bahkan petani pun harus memiliki daya tahan dan beradaptasi ketika harus berhadapan dengan kebijakan dari pemerintah yang selalu berubah (Purnomo; Anand & Choi, 2017). Selain itu, kelompok petani memiliki nilai bahwa alam, hutan, dan lahan adalah mitra bahkan

ibu dari kehidupannya (Ramdani, 2016). Keberhasilan dalam melakukan fungsi konservasi terhadap lingkungan sangat ditentukan oleh nilai-nilai kepercayaan yang dianut tersebut. Apabila hanya melihat alam sebagai objek maka aktivitas pertanian hanya akan dilakukan semena-mena dengan tanpa memandang penting melakukan fungsi konservasi.

## Kesimpulan

Ide developmentalisme yang membasiskan pembangunan pada sektor industri dan pertumbuhan ekonomi tidak sepenuhnya bisa diterima ketika dihadapkan pada kondisi masyarakat yang masih agraris. Dalam konteks Indonesia, dengan mayoritas penduduk miskin masih berada di pedesaan dengan karakteristik yang agraris, maka pendekatan pembangunan institusionalisme harus menjadi alternative pilihan di dalam paradigma pembangunan. Pembangunan tidaklah harus melakukan perubahan masyarakat dari agraris ke industri, akan tetapi seharusnya pembangunan itu adaptive, lahir dari dinamika masyarakat itu sendiri, dan berkelanjutan.

Dalam paper ini penulis memiliki argumentasi bahwa perkebunan karet alam merupakan komoditas yang bisa dijadikan sebagai basis dalam pembangunan yang mengadopsi paradigma institusionalisme tersebut. Dimana karet alam merupakan komoditas yang adaptif dan berkelanjutan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa karet alam merupakan aktivitas ekonomi yang telah menyatu dan menjadi identitas kebudayaan masyarakat, khususnya petani, di pedesaan Indonesia. Petani karet bisa hidup dengan tarap hidup memadai dan mampu merubah struktur keluarga dengan

menyekolahkan anak-anaknya di perguruan tinggi.

Misalkan di Riau, masyarakat Melayu di desa memandang bahwa karet alam adalah sumber penghidupan bagi mereka yang sifatnya panjang, mereka yang memilikinya identik dengan tarap hidup yang memadai. Sekalipun harga karet alam mengalami penurunan yang luar biasa, akan tetapi keadaan tersebut tidak terlalu berpengaruh terhadap kualitas dan kondisi ekonomi masyarakat di pedesaan apabila petani memadukan perkebunan dengan peternakan. Justru petani karet alam bisa menyekolahkan anak mereka ke jenjang serjana dan mendapatkan penghasilan yang cukup. Hal ini menunjukkan bahwa, sekalipun *income* yang didapatkan tidaklah terlalu besar secara kuantitatif, akan tetapi terjadi perubahan kualitas hidup yang memadai dan itulah hakikat dari pembangunan yang membebaskan (Sen, 2000; Ul Haq, 2003).

Di sisi lain dari sisi keberlanjutan, karet alam merupakan komoditas yang ramah akan lingkungan. Dimana kebun karet alam memiliki tutupan yang sangat rindang. Tanaman karet alam yang ditanam di lahan gambut memiliki tingkat kebasahan yang tinggi untuk selalu sebagai sumber penyerapan CO<sub>2</sub> dan penghasil O<sub>2</sub>. Perkebunan karet alam pun mampu memberi

fungsi *orologis* bagi wilayah di sekitarnya dan mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Lebih-lebih, di perkebunan-perkebunan karet alam kaya akan fauna terutama kera Sumatera. Sisi keberlanjutan harus menjadi tolak ukur utama di dalam pembangunan ekonomi sebagai basis dari paradigma *sustainable development* (Ramdani, 2017).

Pekerjaan rumah yang harus dilakukan oleh pemerintah saat ini adalah bagaimana secara makro bisa menstabilkan harga karet alam dari tekanan eksternal, mengintegrasikan perkebunan karet dengan peternakan, dan di saat yang bersamaan bisa melakukan penguatan terhadap institusi petani. Dengan meminjam idenya Cortner (2014), Empat tahapan bisa dilakukan untuk menguatkan institusi petani karet alam tersebut yaitu; memberikan dukungan kebijakan dari pemerintah baik pusat dan daerah untuk menguatkan institusinya, pemerintah berperan aktif dan turut serta di dalam melakukan penguatan kapasitas petani karet alam, mengembangkan jejaring dan kerja sama antar petani karet alam dengan pemerintah, kelompok petani lain, pihak perusahaan, *NGOs*, dan perguruan tinggi, dan menghimpun petani karet alam di dalam suatu organisasi yang memiliki modal dalam bentuk koperasi.

## Daftar Pustaka

- Agrawal A. (2001) Common property institutions and sustainable governance of resources. *World development* 29: 1649-1672.
- Anonim. (2017) Natural rubber prices expected to decline. *Weibold*. the UK
- Anwar. C. 2006. *Perkembangan Pasar Dan Prospek Agrarbisnis Karet alam Di Indonesia*. Pusat Penelitian Karet alam. Tjokrowinoto, M. Tt. *Konsep dan Isue Pembangunan Nasional*. MAP UGM.
- Asmani n. (2012). Penyerapan Emisi Dan Peningkatan Pendapatan Masyarakat Sekitar Kawasan Hutan Produksi Yang Terdegradasi Melalui Kegiatan Agroforestry Karet

- Alam. Seminar Nasional Karet Alam Perheppi Jambi.  
[http://eprints.unsri.ac.id/1126/1/No.21\\_Prosiding\\_Penyerapan\\_emisi\\_melalu\\_Agrofor\\_estri\\_Karet\\_Najib\\_Unsri.pdf](http://eprints.unsri.ac.id/1126/1/No.21_Prosiding_Penyerapan_emisi_melalu_Agrofor_estri_Karet_Najib_Unsri.pdf)
- BPS. (2018) Jumlah Penduduk Miskin, Persentase Penduduk Miskin dan Garis Kemiskinan, 1970-2017. Jakarta, Indonesia: Badan Pusat Statistik.
- Borg, R., Toikka, A., & Primmer, E. (2015). Social capital and governance: a social network analysis of forest biodiversity collaboration in Central Finland. *Forest Policy and Economics*, 50, 90-97. doi: <https://doi.org/10.1016/j.forpol.2014.06.008>
- Creswell JW and Creswell JD. (2017) *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*: Sage publications.
- Cortner, H. J. (2014). Governance and Institutions. *Journal of Sustainable Forestry*, 65-96.
- Fakih M. (2001) *Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hamilton-Hart, N. (2014). Multi Level (mis)governance of Palm Oil Production. *Australian Journal of International Affairs*, 1-21. doi: 10.1080/10357718.2014.978738
- Hendaryati ED. (2017) Statistik Perkebunan Indonesia 2015-2017 Karet alam. Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian.
- Hooijer A, Page S, Canadell J, et al. (2010) Current and future CO<sub>2</sub> emissions from drained peatlands in Southeast Asia. *Biogeosciences* 7: 1505-1514.
- Investment I. (2018) Karet alam.
- Jhingan ML. (1988) *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*, Jakarta: Rajawali.
- Kniivilä M. (2007) Industrial development and economic growth: Implications for poverty reduction and income inequality. *Industrial development for the 21st century: Sustainable development perspectives* 1: 295-333.
- Kuznets S. (1955) Economic growth and income inequality. *The American Economic Review*: 1-28.
- Meilani E. (2017). Analisis Faktor-Faktor Yang Berperan Dalam Meningkatkan Pendapatan Petani Karet Alam Di Desa Bhakti Negara Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan. Skripsi. UIN Raden Intan Lampung.  
<http://repository.radenintan.ac.id/1874/1/SKRIPSI LENGKAP EVITA.pdf>
- Miettinen J, Hooijer A, Shi C, et al. (2012) Extent of industrial plantations on Southeast Asian peatlands in 2010 with analysis of historical expansion and future projections. *Gcb Bioenergy* 4: 908-918.
- Miharja R. (2014). Pengaruh Tingkat Pendapatan Petani Karet alam Terhadap Kesejahteraan Keluarga di Desa Gunung Kesiang Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi. Skripsi. Universitas Islam Negeri Sultan Sarif Kasim Riau. <http://repository.uin-suska.ac.id/4595/4/BAB%20III.pdf>
- Mustofa C. (2007). Diktat Mata Kuliah Studi Pembangunan. Surabaya Indonesia: IAIN Sunan Ampel Surabaya.
- Ostrom E and Hess C. (2000) Private and common property rights. *BOUCKAERT, Boudewijn a Gerrit DE GEEST (eds.). Encyclopedia of law and economics* 2: 53-106.
- Parhusip AB. (2008) Potret karet alam Indonesia. *Economic Review* 213.

- PPKIBP. 2015. *Analisis Pemanfaatan Negosiasi Komoditas Untuk Meningkatkan Harga Jual Produk Karet Indonesia ke Dunia*. Jakarta: Kementerian Perdagangan.
- Purnomo D. (2009). Fenomena migrasi tenaga kerja dan perannya bagi pembangunan daerah asal: studi empiris di kabupaten wonogiri. <https://publikasiilmiah.ums.ac.id/bitstream/handle/11617/95/06-Didit.pdf?sequence=1>
- Purnomo, E. P. A., PB; Choi, Jin-Wook. (2017). The complexity and consequences of the policy implementation dealing with sustainable ideas. *Journal of Sustainable Forestry*, 1-16.
- Quinn CH, Huby M, Kiwasila H, et al. (2007) Design principles and common pool resource management: An institutional approach to evaluating community management in semi-arid Tanzania. *Journal of environmental management* 84: 100-113.
- Ramdani R. (2017) The Debate of Development Idea: What Do We Mean by Development and How Do We Measure It? <https://www.researchgate.net>
- Ramdani, R. (2016). Pendelegasian Kewenangan Dalam Pengelolaan Hutan: Studi Kasus Kelompok Tani Hutan (KTH) Kemasyarakatan Sedyo Makmur Kecamatan Semanu, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. *PUBLISIA (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, 1(2).
- Rostow WW. (1990) *The stages of economic growth: A non-communist manifesto*: Cambridge university press.
- Sachs JD. (2015). *The age of sustainable development*: Columbia University Press.
- Safi'I, H.M. 2009. *Perencanaan Pembangunan Daerah*. Yogyakarta. Averros.
- Savić D, Jeremic V and Petrovic N. (2016). Rebuilding the pillars of sustainable society index: A multivariate post hoc I-distance approach. [papers.ssrn.com](https://papers.ssrn.com).
- Sekretaris Jendral. 2007. *Sekilas Industri Karet alam*. Jakarta: Kementerian Perindustrian dan Perdagangan.
- Sen A. (2000) Development as freedom. *Development In Practice-Oxford*- 10: 258-258.
- Solow RM. (1988) Growth theory and after. *The American Economic Review* 78: 307-317.
- Sukirno S. (2006) *Makroekonomi; Teori Pengantar*, Jakarta: Grasindo.
- Susetiawan. (2009) *Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat: Ketidakberdayaan Para Pihak Melawan Konstruksi Neoliberalisme*. Yogyakarta Pusat Studi Pedesaan dan Kawasan UGM, 30-35
- Susetiawan. (2012) Teori People Center Development. *Dalam Mater Kuliah MAP UGM*. Yogyakarta: MAP UGM.
- Ul Haq M. (2003) The human development paradigm. *S. Fukuda-Parr and AK*.
- Willis K. (2011) *Theories and practices of development*: Taylor & Francis.
- Wulandari A. (2006) Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Dari Indonesia Ke Amerika Kurun Waktu 1980-2003. Yogyakarta, Indonesia: Fakultas Ekonomi. Universitas Islam Indonesia.
- Zurriyati Y, Batubara A And Syam A. (2004) Kajian integrasi ternak kambing dengan perkebunan karet alam di Propinsi Riau. *Jurnal Sistem Integrasi Tanaman-Ternak. Denpsar*: 20-22